



KOMINFO

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

"Menuju Masyarakat Informasi Indonesia"

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta 10110 Telp./ Fax. (021) 3842526 www.kominfo.go.id

Jakarta **2** Maret 2015

Nomor : **46** /Kominfo/BLSDM.5/LT.03.07/03/2015
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Program Beasiswa S2 Dalam Negeri Kementerian Kominfo Tahun 2015

Kepada Yth.
(Daftar terlampir)

di -

Tempat

Dalam rangka mendukung upaya peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Tahun Anggaran 2015 kembali akan melaksanakan Program Beasiswa S2 Dalam Negeri, yang telah dikembangkan sejak tahun 2007.

Adapun persyaratan umum yang harus dipenuhi untuk mengikuti Program Beasiswa tersebut adalah:

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada instansi pemerintah Pusat dan Daerah (kecuali PNS pada instansi sektor pendidikan), anggota TNI/Polri;
2. Berusia maksimum 37 tahun pada saat mendaftarkan diri;
3. Berstatus PNS dan-TNI/Polri aktif yang memiliki masa kerja minimum 2 tahun;
4. Mendapatkan izin dan rekomendasi dari pejabat berwenang (minimum pimpinan instansi setingkat Eselon II) di instansi yang bersangkutan untuk menjalani pendidikan;
5. Belum memiliki gelar S2 dan tidak sedang mengikuti program pendidikan S2 dari lembaga lain;
6. Persyaratan lainnya mengikuti persyaratan masing-masing Perguruan Tinggi yang dipilih.

Program studi yang dibiayai melalui Program Beasiswa ini adalah:

1. Program Studi S2 *Chief Information Officer* (CIO)

Program Beasiswa untuk bidang studi ini dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan SDM aparatur pemerintah yang unggul dalam pengembangan e-Government di lingkungan instansi pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Sasaran program adalah tersedianya SDM pengelola e-Government di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.

Program Beasiswa S2 CIO dilaksanakan bekerjasama dengan 5 (lima) Perguruan Tinggi, yaitu:

- a. Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta;
- b. Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung (STEI - ITB) di Bandung;
- c. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) di Surabaya;
- d. Universitas Indonesia (UI) di Jakarta;
- e. Universitas Negeri Padang (UNP).

Persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk mengikuti Program Beasiswa CIO, adalah tugas dan fungsinya terkait dengan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di instansi yang bersangkutan. Pemenuhan persyaratan ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Jabatan (SPMJ), dan Surat Keputusan Jabatan Struktural bagi yang sudah menjabat atau Surat Penempatan dari unit yang menangani kepegawaian dari masing-masing instansi kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas di bidang terkait.

2. Program Beasiswa S2 Ilmu Komunikasi

Program Beasiswa S2 Ilmu Komunikasi dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan SDM aparatur pemerintah yang unggul untuk mendukung pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah.

Sasaran Program Beasiswa S2 Ilmu Komunikasi adalah tersedianya SDM pengelola pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah di lingkungan instansi pemerintah Pusat dan Daerah.

Program Beasiswa S2 Ilmu Komunikasi dilaksanakan bekerjasama dengan 7 (tujuh) Perguruan Tinggi, yaitu:

- a. Universitas Indonesia (UI) di Jakarta;
- b. Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta;
- c. Universitas Andalas (Unand) di Padang;
- d. Universitas Airlangga (Unair) di Surabaya;
- e. Universitas Hasanuddin (Unhas) di Makassar;
- f. Universitas Sumatera Utara (USU) di Medan;
- g. Universitas Sebelas Maret (UNS) di Surakarta.

Persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk mengikuti Program Beasiswa S2 Ilmu Komunikasi adalah tugas dan fungsinya terkait dengan pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah. Pemenuhan persyaratan ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Jabatan (SPMJ), dan Surat Keputusan Jabatan Struktural bagi yang sudah menjabat atau Surat Penempatan dari unit yang menangani kepegawaian dari masing-masing instansi kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas di bidang terkait ✓

Pelaksanaan Program dilaksanakan dengan skema *cost-sharing*, yang mana Kementerian Kominfo menanggung biaya pendidikan sesuai dengan SPP yang telah ditetapkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi selama masa studi normal dan biaya operasional yang diberikan sebagai bantuan tambahan biaya perkuliahan dengan jumlah sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah), dan instansi pengirim bertanggung jawab untuk menyediakan biaya hidup dan biaya lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk menyebarluaskan informasi ini kepada seluruh pegawai yang memenuhi persyaratan di lingkungan instansi dan mengintegrasikan Program kami ini ke dalam perencanaan Program Pengembangan SDM di lingkungan instansi Bapak/Ibu.

Keterangan terkait, jadwal rencana kegiatan sosialisasi dan seleksi awal di daerah, prosedur pendaftaran, jadwal pendaftaran, dan seleksi Program Beasiswa lebih lanjut dapat dilihat pada situs web resmi masing-masing Perguruan Tinggi, dan keterangan lebih lanjut terkait penyelenggaraan Program Beasiswa dapat dilihat pada situs web www.balitbang.kominfo.go.id atau dapat menghubungi Tim Pengembangan SDM melalui email tpsdm@mail.kominfo.go.id atau timpengembangansdmdua@gmail.com

Demikian yang disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Litbang SDM
Kementerian Kominfo,



Tembusan Yth.

Menteri Komunikasi dan Informatika (sebagai Laporan)

LAMPIRAN : SURAT KEPALA BADAN LITBANG SDM
NOMOR : 46/KOMINFO/BLSDM.5/LT.03.07/03/2015
TANGGAL : 2 MARET 2015

DAFTAR LAMPIRAN

1. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kementerian Sekretariat Negara
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan ✓
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
16. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
17. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
18. Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata
19. Sekretaris Jenderal Kementerian BUMN
20. Sekretaris Jenderal Kementerian Koperasi dan UMKM
21. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang
22. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
23. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
24. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial
25. Sekretaris Jenderal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
26. Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah
27. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi
28. Sekretaris Jenderal Kementerian Pemuda dan Olahraga
29. Sekretaris Jenderal Kementerian Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
30. Sekretaris Jenderal Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
31. Sekretaris Jenderal Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
32. Sekretaris Jenderal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

33. Sekretaris Jenderal Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
34. Kepala Biro Administrasi dan Pengawasan MPR RI
35. Deputi Bidang Administrasi DPR RI
36. Kepala Biro Administrasi DPD RI
37. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung
38. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
39. Kepala Biro Umum Komisi Yudisial
40. Sekretaris Utama Badan Pemeriksa Keuangan
41. Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara
42. Sekretaris Utama Badan Keuangan Negara
43. Sekretaris Utama Badan Kependudukan, dan Keluarga Berencana Nasional
44. Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal
45. Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial
46. Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
47. Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional
48. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
49. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
50. Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
51. Sekretaris Utama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
52. Sekretaris Utama Badan Kemanan Laut RI
53. Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir
54. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Obat dan Makanan
55. Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
56. Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional
57. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik
58. Sekretaris Utama Badan SAR Nasional
59. Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional
60. Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional
61. Sekretaris Utama Badan Lembaga Administrasi Negara
62. Sekretaris Utama Badan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
63. Sekretaris Utama Badan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
64. Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional
65. Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
66. Sekretaris Utama Lembaga Sandi Negara
67. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional
68. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung
69. Asisten Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara RI
70. Kepala Sekretariat Umum Tentara Nasional RI
71. Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet RI